

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025



DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 000.72/ 30.8.566 /WK-PYK/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 367 Ayat (2) menyatakan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2025.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang menyusun Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada dictum kedua sebagai berikut:
- a. dinas pendidikan
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pepaduan kebakaran;
 - f. badan penanggulangan bencana daerah;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas tenaga kerja dan perindustrian;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas ketahanan pangan;
 - k. dinas lingkungan hidup;
 - l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. dinas perhubungan;
 - n. dinas komunikasi dan informatika;
 - o. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - p. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - q. dinas pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - r. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - s. dinas pertanian;
 - t. sekretariat daerah;
 - u. sekretariat DPRD;
 - v. badan perencanaan pembangunan daerah;
 - w. badan keuangan daerah;
 - x. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - y. inspektorat;
 - z. kecamatan payakumbuh utara;
 - aa. kecamatan payakumbuh barat;
 - bb. kecamatan payakumbuh timur;
 - cc. kecamatan payakumbuh selatan;
 - dd. kecamatan lamposi tigo nagori; dan
 - ee. kantor kesbangpol.
- KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun

berkenaan;
c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
d. penutup.

- KELIMA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 berpedoman pada :
a. Perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025;
b. Hasil pengendalian pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai triwulan ke II tahun berkenaan.
- KETUJUH : Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja anggaran Perangkat daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2025



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Perangkat Daerah Kota Payakumbuh.
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Dengan demikian program ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Secara umum tujuan dari ketahanan pangan harus diorientasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada adanya kebijakan dan kinerja sektor yang terkait dengan program ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan daerah. Dengan berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka disusunlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) ini memuat antara lain ; potensi, kondisi saat ini, sasaran, arah kebijakan, program serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 serta rencana indikatif perubahan pendanaannya.

Perubahan Renja-PD ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan Ketahanan Pangan ke depan sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Payakumbuh, 8 Agustus 2025
KEPAJADINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1 TAHUN BERKENAAN	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	23
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD.....	29
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	38
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	40
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN TH 2025	41
BAB IV PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel II-1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025.....	16
Tabel II-2. Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	23
Tabel II-3. Analisis Pencapaian Sasaran 2.....	25
Tabel II-4. Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	29
Tabel 5. Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025	50

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Dokumen ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, di samping mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 juga memperhatikan kebijakan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan mengakomodir isu-isu strategis lainnya/di bidang ketahanan pangan. Secara khusus, perubahan Renja dilakukan untuk rasionalisasi anggaran dan memenuhi beberapa kebutuhan Dinas yang belum terakomodir didalam DPA awal tahun 2025.

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Terkait pada hal tersebut terdapat

beberapa kegiatan/subkegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan yang perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif dan efisien.

Penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada beberapa hal, di antaranya:

- a. Rancangan Perubahan RKPD
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan.

1.2.Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, tambahan lembaran daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 10);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025.

1.3.Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk :

- a. Memahami dengan lebih baik lingkungan internal dan eksternal Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sehingga terjadi interaksi aktif dalam pelaksanaan tugas
- b. Menganalisa dan mengkaji secara rinci faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal
- c. Menetapkan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai panduan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pedoman perubahan perencanaan dan pelaksanaan teknis tahunan yang memuat kebijakan, program- program, sasaran-sasaran yang akan dicapai serta indikasi kegiatan pembangunan.

b. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

- a. Mengantisipasi perubahan lingkungan global yang terjadi begitu cepat seperti perkembangan teknologi dan informasi, sementara sumber daya yang tersedia begitu terbatas. Dengan adanya rencana strategis, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.

- b. Memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
- c. Mengetahui orientasi organisasi di masa yang akan datang
- d. Untuk meningkatkan komunikasi di antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai panduan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta perubahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan triwulan I Tahun Berkenaan.
Bab ini memaparkan tentang evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dan capaiannya terhadap Renstra SKPD, memaparkan tentang analisis kinerja pelayanan SKPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memaparkan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tentang tujuan dan sasaran dari penyusunan Renja, tentang program dan kegiatan yang akan direncanakan dilakukan perubahan pada tahun 2025 berikut dengan kebutuhan dana yang diinginkan.

BAB IV. Penutup

Bab ini memaparkan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan maupun mengenai ketersediaan anggaran, selain itu juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan dan Capaian Renstra SKPD

Urusan Pangan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan yang pada APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan dana sebesar Rp.3.383.291.328,- dengan 5 program dan 14 kegiatan dengan yang mencakup 32 sub kegiatan. Program Dinas Ketahanan Pangan yang telah dianggarkan, semenjak bulan awal Januari 2025 sudah berjalan pada beberapa sub kegiatan dimana sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025, anggaran telah terealisasi sebesar Rp.513.483.354,- atau 15,18% dari total pagu anggaran dinas. Jika dibagi sesuai dengan proporsi pembagian triwulan, seharusnya pada akhir triwulan I berada pada realisasi anggaran sebesar 25,00%. Kondisi ini terjadi disebabkan beberapa hal terutama pada penerapan aplikasi inaproc versi 6 terbaru dan aplikasi coretax dalam hal perpajakan. Oleh karenanya dengan penerapan aplikasi tersebut kebanyakan pencairan anggaran baru terlaksana pada awal Maret 2025. Dari 32 sub kegiatan yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kewenangannya, ada beberapa sub kegiatan yang realisasinya masih berada dibawah 6% sampai akhir Maret 2025, (triwulan I 2025), diantaranya Program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang ada pada Tahun 2025 adalah :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target Capaian Program : Nilai IKM 86

1. Kegiatan :

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar sebesar 0,75% dari pagu anggaran dimana beberapa kebutuhan pelaksanaan sub kegiatan ini masih dalam proses administrasi.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada triwulan I 2025 belum terlihat adanya pencairan anggaran dikarenakan untuk perencanaan penganggarnya baru akan cair pada petengahan triwulan II 2025.

b. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai pada triwulan I 2025 belum terlihat adanya pencairan anggaran dikarenakan untuk perencanaan penganggarnya baru akan cair pada petengahan triwulan II 2025.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor pada triwulan I 2025 belum terlihat adanya pencairan anggaran dikarenakan untuk perencanaan penganggarnya baru akan cair pada petengahan triwulan II 2025.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi sebesar 3,08%. Namun ada beberapa pengadaan yang akan dilaksanakan dan masih dalam proses persiapan administrasi.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang masih belum ada pencairan anggaran, namun beberapa kebutuhan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi.
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang digunakan untuk kebutuhan dalam menyambut tamu yang sampai dengan triwulan I 2025 belum terealisasi dikarenakan belum adanya kunjungan tamu yang akan difasilitasi.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel memang belum terealisasi dikarenakan rencana pencairan anggarannya baru akan dilaksanakan pada triwulan II 2025
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang juga masih belum ada pencairan anggaran. Namun proses persiapan administrasinya sudah mulai dilaksanakan.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya memang belum terealisasi dikarenakan rencana pencairan anggarannya baru akan dilaksanakan pada triwulan IV 2025

5. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditujukan untuk perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan mesin yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, dimana sampai dengan akhir Maret 2025, belum adanya peralatan dan mesin lainnya yang memerlukan perbaikan ataupun pemeliharaan rutin lainnya.

B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Target Capaian Program :

- % cadangan pangan yang tersedia (masyarakat + Pemda) 53%

Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan daerah Kab/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik secara anggaran masih belum terlihat pencairannya namun beberapa kebutuhan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi.

C. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Target Capaian Program :

- % masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE 62%
- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan 58%

Kegiatan :

1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga secara anggaran masih belum terlihat pencairannya namun pelaksanaan sub kegiatan ini telah berjalan dan juga beberapa kebutuhan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi.
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) secara anggaran masih belum terlihat pencairannya namun pelaksanaan sub kegiatann ini telah berjalan dan juga beberapa kebutuhan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum terealisasi dikarenakan rencana pencairan anggarannya baru akan dilaksanakan pada triwulan IV 2025
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota terealisasi sebesar 4,64% namun pelaksanaan kegiatan terkait sub kegiatan ini tetap berjalan dan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi

D. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Target Capaian Program : Skor PPH Ketersediaan 89,20

Kegiatan :

Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

a) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota secara anggaran belum ada yang terealisasikan namun pelaksanaan kegiatan terkait sub kegiatan ini tetap berjalan dan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi.

b) Sub Kegiatan Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan secara anggaran belum ada yang terealisasikan namun pelaksanaan kegiatan terkait sub kegiatan ini tetap berjalan dan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi.

E. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Kegiatan :

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 1) Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 4,22% namun pelaksanaan kegiatan terkait sub kegiatan ini tetap berjalan dan pencairan anggaran masih dalam proses persiapan administrasi.

Beberapa sub kegiatan tersebut di atas walaupun ada yang masih rendah dan ada yang belum ada pencairan, namun Dinas Ketahanan Pangan selaku instansi yang memiliki kewenangan ketahanan pangan telah

melaksanakan kegiatan yang akan mendukung pencapaian kinerja dinas. Namun kondisi-kondisi yang umumnya terjadi saat ini terutama dengan penerapan aplikasi baru menyebabkan penyiapan berkas administrasi pencairan anggaran terkendala selain dari beberapa kondisi lainnya yang telah disebutkan di atas

Tabel II-1
Evaluasi Hasil Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPD sampai Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan I	Realisasi kinerja dan anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra s/d Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab	
			5		6		7		8		9=8		10=8/7*100	11=6+9		12=11/5 x100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
2.3	PANGAN																	13	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	86,5	Nilai	10.153.820.818	85,60	7.400.604.905	86	Nilai	2.797.114.828	-	487.539.614	-	487.539.614,00	-	85,60	7.888.144.519	98,96	77,69
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	85	%	71.251.080	85,00	67.076.260	85	%	84.932.200	25,00	9.486.125	25,00	9.486.125,00	29,41	85,00	76.562.385	100,00	107,45
2 09 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Dokumen	33.307.960	6,00	42.337.610	3	Dokumen	22.390.350	1,00	9.017.125	1,00	9.017.125,00	33,33	7,00	51.354.735	58,33	154,18
2 09 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	24	Dokumen	37.943.120	13,00	24.738.650	6	Dokumen	62.541.850	1,00	469.000	1,00	469.000,00	16,67	14,00	25.207.650	58,33	66,44
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan terhadap aliran kas	90	%	8.676.523.664	90	5.832.790.967	90	%	2.143.099.563	72,84	430.180.039	72,84	430.180.039,00	80,94	90,00	6.262.971.006	100,00	72,18
2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	80	orang	8.563.620.464	43	5.573.542.477	17	orang	2.013.787.563	21	413.172.039	20,52	413.172.039,00	120,69	63,52	5.986.714.516	79,40	69,91
2 09 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	dok	104.903.200	24	241.609.500	12	dok	129.312.000	3	17.008.000	3,00	17.008.000,00	25,00	27,00	258.617.500	56,25	246,53
2 09 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	48	Laporan	8.000.000	27	17.638.990	-	Laporan	-	-	-	-	-	N/A	27,00	17.638.990	56,25	220,49

2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kepegawaian	100	%	64.200.000	100	25.884.000	100	%	34.183.250	20	-	20,00	-	20,00	100,00	25.884.000	100,00	40,32
2 09 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	72	paket	48.235.760	19	25.884.000	35	paket	23.011.000	-	-	-	-	-	19,00	25.884.000	26,39	53,66
2 09 01 2.05 0005	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	4	Dokumen	15.964.240	1	10.090.850	1	Dokume	11.172.250	-	-	-	-	-	1,00	10.090.850	25,00	63,21
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum sesuai standar	85	%	638.143.632	85	788.640.282	85	%	197.417.050	8,86	19.126.090	8,86	19.126.090,00	10,42	85,00	807.766.372	100,00	126,58
2 09 01 2.06 0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	paket	8.261.200	9	4.815.000	7	paket	1.608.000	-	-	-	-	-	9,00	4.815.000	25,00	58,28
2 09 01 2.06 0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	paket	28.000.000	7	28.635.000	-	paket	-	-	-	-	-	#DIV/0!	7,00	28.635.000	175,00	102,27
2 09 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	3	25.150.000	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	3,00	25.150.000	N/A	N/A
2 09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	210	paket	55.226.880	113	45.133.800	34	paket	16.209.000	5,88	500.000	5,88	500.000,00	17,30	118,88	45.633.800	56,61	82,63
2 09 01 2.06 0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16	paket	32.264.720	7	29.687.320	4	paket	8.250.850	-	-	-	-	-	7,00	29.687.320	43,75	92,01
2 09 01 2.06 0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8	paket	34.368.800	4	25.174.800	2	paket	8.389.500	35	1.332.800	35,00	1.332.800,00	1.750,00	39,00	26.507.600	487,50	77,13
2 09 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	20	laporan	2.600.000	5	6.743.400	5	laporan	5.265.700	20	260.000	20,00	260.000,00	400,00	25,00	7.003.400	125,00	269,36
2 09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	450	laporan	477.422.032	200	623.300.962	100	laporan	157.694.000	10	17.033.290	10,00	17.033.290,00	10,00	210,00	640.334.252	46,67	134,12

2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan	85	%	116.100.000	85	151.319.500	85	%	79.784.000	-	-	-	-	-	85,00	151.319.500	100,00	130,34
2 09 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	8	paket	60.000.000	-	11.640.000	55	paket	62.034.000	-	-	-	-	-	-	11.640.000	-	19,40
09 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	1	-	4.750.000	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A
2 09 01 2.07 0011	Pengadaan sarana dan parasarana pendukung gedung kantor atau	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	4	paket	46.100.000	1	14.779.000	-	paket	-	-	-	-	-	N/A	1,00	14.779.000	25,00	32,06
2 09 01 2.07 0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4	unit	10.000.000	9	124.900.500	2	unit	13.000.000	-	-	-	-	-	9,00	124.900.500	225,00	1.249,01
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah sesuai standar	85	%	127.302.442	85	204.574.513	85	%	126.788.865	16	17.034.185	15,83	17.034.185,00	18,62	85,00	221.608.698	100,00	174,08
2 09 01 2.08 0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	laporan	6.000.000	2	5.640.000	-	laporan	-	-	-	-	-	N/A	2,00	5.640.000	50,00	94,00
2 09 01 2.08 0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	8	laporan	4.496.000	3	31.608.062	1	laporan	33.765.890	21	7.074.169	20,95	7.074.169,00	2.095,06	23,95	38.682.231	299,38	860,37
2 09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	laporan	116.806.442	2	167.326.451	1	laporan	93.022.975	11	9.960.016	10,71	9.960.016,00	1.070,70	12,71	177.286.467	317,68	151,78
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85	%	460.300.000	85	330.319.383	85	%	130.909.900	9	11.713.175	9,02	11.713.175,00	10,61	85,00	342.032.558	100,00	74,31
2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	Unit	156.760.000	2	103.005.495	1	Unit	42.950.000	7	3.000.000	6,98	3.000.000,00	698,49	8,98	106.005.495	224,62	67,62
2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	Unit	259.600.000	20	206.535.688	10	Unit	78.800.000	11	8.713.175	11,06	8.713.175,00	110,57	31,06	215.248.863	77,64	82,92
2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	paket	43.940.000	14	20.778.200	3	paket	9.159.900	-	-	-	-	-	14,00	20.778.200	155,56	47,29

2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (masy+pemda)	54	%	54.000.000	73,20	76.379.630	53	%	17.857.000	50,60	-	50,60	-	95,47	73,20	76.379.630	135,56	141,44
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%cadangan pangan masyarakat	18	%	54.000.000	26	76.379.630	17	%	17.857.000	14	-	14,00	-	82,35	26,00	76.379.630	144,44	141,44
2 09 02 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	8	kali	4.000.000	2	17.588.070	2	kali	17.857.000	-	-	-	-	2,00	17.588.070	25,00	439,70	
2 09 02 2.01 0006	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia	15	unit	50.000.000	-	58.791.560	-	unit	-	-	-	-	N/A	N/A	58.791.560	N/A	117,58	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standat AKE	62,50	%	845.406.862	68,75	1.926.588.563	62,00	%	450.749.650	60,00	16.911.890	60,00	16.911.890,00	96,77	68,75	1.943.500.453	110,00	229,89
		Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan	58,50	%		55,55		58,00			57,00		57,00		98,28	55,55		94,96	
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan	Persentase Pengembangan usaha kelembagaan distribusi pangan	19	%	132.871.630	20	337.432.665	18	%	153.700.400	17	8.750.000	17,00	8.750.000,00	94,44	37,00	346.182.665	194,74	260,54
		Persentase informasi harga yang up to date	100	%		100		100	%		100		100,00		100,00	100,00		100,00	
2 09 03 2.01 0002	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	4	laporan	20.000.000	-	58.990.000	-	laporan	-	-	-	-	-	N/A	N/A	58.990.000	N/A	294,95

2 09 03 2.01 0006	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani yang dikembangkan	5	lembaga	6.767.426	6	5.848.820	-	lembaga	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	6,00	5.848.820	120,00	86,43
2 09 03 2.01 0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	400	keluarga	50.000.000	100	124.847.840	30	keluarga	47.137.000	-	-	-	-	-	-	100,00	124.847.840	25,00	249,70
	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Jumlah dokumen pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	10	dokumen	39.639.056	1	51.486.005	-	dokume	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	51.486.005	10,00	129,89
09 03 2.01 0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	5	-	87.462.900	10	8.750.000	10,00	8.750.000,00	200,00	10,00	8.750.000	N/A	N/A	
2 09 03 2.01 0010	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan Kab/Kota	Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	8	unit	4.000.000	4	11.144.680	-	unit	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	4,00	11.144.680	50,00	278,62
	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	- Jumlah laporan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	8	laporan	12.465.148	1	85.115.320	-	laporan	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	1,00	85.115.320	12,50	682,83
2 09 03 2.01 0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	jumlah laporan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kab/kota	3	laporan	-	-	16.851.100	-	laporan	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	16.851.100	-	N/A
2 09 03 2.01 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah dokumen pemantauan harga dan pasokan pangan	3	dokumen	-	3	25.527.192	-	dokume	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	3,00	25.527.192	100,00	N/A
2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan NBM	jumlah laporan neraca bahan makanan	3	laporan	-	-	4.530.500	1	laporan	19.100.500	-	-	-	-	-	-	-	4.530.500	-	N/A
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah sesuai SPM	66	%	70.000.000	145,66	123.550.468	64	%	57.325.000	145,66	1.436.400	145,66	1.436.400,00	227,59	145,66	124.986.868	220,70	178,55	
2 09 03 2.02 0003	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang diadakan	16	ton	50.000.000	4	121.062.648	1,50	ton	26.346.000	-	-	-	-	-	4,00	121.062.648	25,00	242,13	
2 09 03 2.02 0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang dikelola			-		17.921.100	39,96	ton	30.979.000	10	1.436.400	10,00	1.436.400,00	25,02	10,00	19.357.500	N/A	N/A	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Kabupaten/Kota	12	kali	20.000.000	-	2.487.820	-	kali	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	2.487.820	-	12,44

2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase masyarakat yang memahami diversifikasi konsumsi pangan	45,00	%	642.535.232	68,75	1.465.605.430	44,00	%	239.724.250	68,75	6.725.490	68,75	6.725.490,00	156,25	68,75	1.472.330.920	152,78	229,14
		persentase masyarakat yang telah terampil dalam mengolah pangan lokal non beras non terigu	23,00	%		20,00		22,00	%	20,00		20,00		90,91	20,00	-	86,96	N/A	
2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	Jumlah dokumen Target konsumsi pangan per kapita per tahun	4	dok	17.023.600	2	11.508.780	1	dok	20.755.750	3	543.900	2,62	543.900,00	262,05	4,62	12.052.680	115,51	70,80
2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan masyarakat dalam pengekangagaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengekangagaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4	dok	554.000.000	2	1.315.281.930	1	dok	218.968.500	3	6.181.590	2,82	6.181.590,00	282,30	4,82	1.321.463.520	120,58	238,53
2 09 03 2.04 0003	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	4	dok	71.511.632	2	138.814.720	-	dok	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2,00	138.814.720	50,00	194,11
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan	89,30	Nilai	226.972.288	89,17	297.816.660	89	Nilai	47.246.000	-	-	-	-	-	89,17	297.816.660	99,85	131,21
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase peningkatan hasil pemanfaatan pekarangan	20	%	171.472.288	20	189.661.670	18	%	17.430.000	18	-	18,00	-	100,00	38,00	189.661.670	190,00	110,61
2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kab/kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	4	dok	162.648.708	2	176.094.050	-	dok	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2,00	176.094.050	50,00	108,27
2 09 04 2.02 0003	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	8	laporan	8.823.580	2	13.567.620	-	laporan	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2,00	13.567.620	25,00	153,77
09 04 2.02 0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1	-	17.430.000	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A

2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti instansi terkait	50	%	55.500.000	50	108.154.990	50	%	29.816.000	10	-	10,00	-	20,00	50,00	108.154.990	100,00	194,87
2 09 04 2.01 0001	Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	4	dokumen	55.500.000	2	108.154.990	1	dokumen	29.816.000	-	-	-	-	-	2,00	108.154.990	50,00	194,87
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	90,00	%	165.464.768	90	138.783.130	90	%	70.323.850	30	9.031.850	30,00	9.031.850,00	33,33	90,00	147.814.980	100,00	89,33
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	'- Persentase masyarakat yang memahami zat berbahaya bagi pangan	20	%	165.464.768	90	138.783.130	19	%	70.323.850	15	9.031.850	15,00	9.031.850,00	78,95	19,00	147.814.980	95,00	89,33
2 09 05 2.01 0004	Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu)) daerah Kabupaten/Kota	4	dokumen	125.464.768	2	39.344.370	1	dokumen	33.784.100	22	7.488.950	22,17	7.488.950,00	2.216,71	24,17	46.833.320	604,18	37,33
2 09 05 2.01 0009	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten/Kota	4	dokumen	40.000.000	2	99.438.760	1	dokumen	36.539.750	-	1.542.900	-	1.542.900,00	-	2,00	100.981.660	50	252,45

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil dan indikator keluaran yang merupakan indikator mikro dalam pencapaian sasaran.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 4 (empat) sasaran yaitu :

Sasaran 1
Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel II-2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025		%	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	Ketersediaan Pangan	Nilai	19.745 ton	-	-	Pengukuran dilakukan pada Triwulan 4

Sumber : DKP, 2025

Sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dilihat dari indikator : Ketersediaan Pangan

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan



SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun

2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Penyusunan PPH dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan PPH memuat 9 (sembilan) kelompok



pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lain-lainnya.

Sasaran 2

Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel II-3
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam,
bergizi seimbang dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025		%	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	Skor PPH Konsumsi	Nilai	85,1	-	-	Penghitungan pada TW III
2.	Tingkat Keamanan Pangan	Level	sedang	-	-	Penghitungan pada TW III

Sumber : DKP, 2025

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Keamanan Pangan. Sasaran terjaganya ketersediaan pangan dengan 2 indikatornya ini juga tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan.

A. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan (RPJMN) 2015-2019 ada empat (4) strategi utama :

1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Salah satu dari empat (4) arah kebijakan pangan yaitu



perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dibidang ketahanan pangan yaitu pencapaian skor PPH Konsumsi. Pentingnya

pencapaian skor PPH Konsumsi tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Tercapainya penganeekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana

untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan memepertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi Tahun 2023 berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakkan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

B. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya yang timbul dari makanan/minuman sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi melalui unsur mikroorganism, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang “standarisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Adapun pengawasan dan pengambilan sampel

bahan pangan akan dilaksanakan sebanyak 1 kali yang terdiri dari uji residu pestisida dan uji formalin.

Sasaran 3

Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel II-4
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025		%	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	Stabilitas Harga					
	* beras	%	10	1,43	185,7	Sampai Triwulan II
	* cabe	%	25	12,84	148,64	Sampai Triwulan II
	* bawang	%	25	14,57	141,72	Sampai Triwulan II
						Sampai Triwulan II
	Rata-rata Capaian Kinerja					

Sumber : Data diolah, DKP 2025

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama daerah dan terkait dengan isu strategis nasional sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada :

- a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena:
- 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
 - 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
 - 3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
 - 4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
 - 5) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
 - 6) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan;
 - 7) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
 - 8) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani;
 - 9) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta
 - 10) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya

penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.

- c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energy dan pakan ternak.
- d. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.
- e. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
- f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
- g. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian
- h. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
- i. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidaklancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena di samping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat, sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini

berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:

- 1) keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;
- 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;
- 3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;
- 5) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 6) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganeekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Kantor Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh :

- a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
- b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
- c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan
- d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

- a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;
- d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi;
- e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Retail Practices (GRP);
- f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;

- g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;
- i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke dalam negeri;
- k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;
- l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan
- m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

4. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja belum seperti yang diinginkan, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.

- b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- c. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah Kota Payakumbuh belum optimal untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- d. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan,
- f. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program,
- g. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program,
- h. Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap pembangunan ketahanan pangan di daerah, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang utama. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional adalah untuk:

- 1) meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan;
- 2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan;
- 3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

- 1) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
- 2) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis;
- 3) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- 1) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- 2) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;
- 3) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- 4) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;

- mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;
- meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar;
- mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain:

- peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
- peningkatan kerjasama dengan mitra kerja,
- peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat;
- penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta
- dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

1. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah:

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah:

- a. Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan
- b. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- c. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan.

3.3. Program dan Kegiatan Yang mengalami Perubahan Tahun 2025

Program dan kegiatan yang direncanakan mengalami perubahan Tahun 2025 adalah :

1. Urusan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan pangan. Untuk menjalankan urusan tersebut Dinas Ketahanan Pangan pada RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar RP.3.364.298.626,-. Dalam proses penganggaran terjadinya dinamika pembahasan pada KUA PPAS dan APBD dengan DPRD sehingga pada penetapan APBD Tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp.3.383.291.328,- yang dirinci pada 5 program dan 14 kegiatan dengan 32 sub kegiatan. Dengan adanya proses efisiensi anggaran, pada rencana perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp.3.309.282.732,- atau berkurang sebesar Rp. 55.015.894,- yang dirinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini mengalami efisiensi pada Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.4.997.350,- dari Rp.22.390.350,- pada RKPD tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.17.393.000,- dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.62.541.850,- menjadi Rp.48.328.800,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 atau mengalami efisiensi sebesar Rp.14.213.050,-

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Perubahan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah hanya pada tahapan penganggaran dikarenakan dinamika pembahasan pada KUA PPAS dan APBD dengan DPRD, namun secara detail pada sub kegiatan ada proses efisiensi dan penambahan anggaran untuk pengelola keuangan sesuai aturan baru yaitu sebagai berikut :

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan pada waktu pembahasan KUA PPAS dan APBD dengan DPRD sehingga mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.3.992.802,- dari anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp.2.009.794.761,- menjadi Rp.2.013.787.563,- pada APBD Tahun 2025. Lalu dilakukan efisiensi sebesar Rp. 23.287.145,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sehingga menjadi Rp.1.986.507.616.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.8.176.000,- untuk memenuhi honorarium pengelola keuangan sesuai dengan aturan sehingga anggaran dari Rp.129.312.000,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.137.488.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mengalami penambahan anggaran Rp.7.239.000,- untuk memenuhi kebutuhan dalam pengadaan pakaian dinas dari pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.23.011.000,- menjadi Rp.30.250.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- 2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.9.789.250,- dari anggaran sebesar Rp.11.172.250,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.1.383.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mengalami perubahan pada sub kegiatan berikut :

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.5.688.000 dari Rp.16.209.000,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.21.897.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- 2) Efisiensi anggaran dilakukan pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.1.310.850,- dari Rp.8.250.850,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.6.940.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.2.770.200,- dari Rp.5.265.700,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.2.495.500,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilakukan efisiensi sebesar Rp.77.089.000,- dari pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.157.694.000,- menjadi Rp.80.605.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini mengalami perubahan pada sub kegiatan berikut :

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Mebel dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.45.003.000,- sehingga menjadi Rp.107.037.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dari Rp.62.034.000,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 untuk pembelian mebel perkantoran.
- 2) Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami penambahan anggaran Rp.77.118.000,- menjadi Rp.90.118.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dari Rp.13.000.000,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 yang dipergunakan untuk kebutuhan mobilitas perkantoran Dinas Ketahanan Pangan.
- 3) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.10.550.000,- dari anggaran Rp.4.750.000,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.15.300.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk menambah sarana dan prasaran Gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Efisiensi kegiatan sebesar Rp.14.029.649,- dengan rincian pada sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami efisiensi sebesar Rp.4.388.290,- dari anggaran sebesar Rp.33.765.890,- menjadi Rp.29.377.600,- pada perubahan RKPD Tahun 2025.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami efisiensi sebesar Rp.9.641.359,- dari Rp.93.022.975,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.83.381.616 pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Efisiensi kegiatan sebesar Rp.3.749.900,- dengan rincian pada sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diefisiensikan sebesar Rp.3.760.000,- sehingga menjadi Rp.39.190.000,- pada perubahan RKPD Tahun 2025 jika dibandingkan pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.33.765.890,-
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.10.100,- sehingga mejadi Rp.9.170.000,- pada perubahan RKPD Tahun 2025 dari pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.9.159.900,-

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Subkeg Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dengan pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.17.857.000,- berkurang menjadi Rp.11.057.000,- pada

Perubahan RKPD tahun 2025 dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp.6.800.000,-

3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan,

- 1) Sub kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dilakukan efisiensi sebesar Rp.200.000,- dari pagu RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.47.137.000,- menjadi Rp.46.937.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025
- 2) Sub kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.39.399.100,- dari anggaran RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.87.462.900,- menjadi Rp.126.862.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk mengakomodir dan keberlanjutan kegiatan 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada gerakan pangan murah
- 3) Sub kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dilakukan efisiensi sebesar Rp.13.722.000,- sehingga menjadi Rp.5.378.500,- pada perubahan RKPD Tahun 2025 yang sebelumnya sebesar Rp.19.100.500,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025.

b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- 1) Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi dilakukan dikarenakan untuk cadangan pangan Kota Payakumbuh telah melebihi ketentuan yang berlaku sehingga sub kegiatan ini yang sebelumnya ada pada RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.26.346.000,-

tidak dilaksanakan lagi pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dan dana sebesar Rp.26.346.000,- dialihkan untuk sub kegiatan lainnya.

- 2) Sub kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota mengalami efisiensi Rp.24.750.000 yang disesuaikan dengan biaya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah ada dimana berkurang dari RKPD dan APBD Tahun 2025 sebesar Rp.30.979.000,- menjadi Rp.6.229.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Secara umum kegiatan ini hanya terjadi perubahan pada dinamika pembahasan KUA PPAS dan APBD dengan DPRD sehingga mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.14.999.900,- yang terjadi pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, dilakukan pengurangan dan penambahan anggaran pada sub kegiatan untuk menyesuaikan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh serta akomodir program nasional sehingga menjadikan penambahan anggaran sebesar Rp.15.616.600 dengan rincian sub kegiatan yaitu :

- 1) Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.16.792.250,- dari pagu Rp.20.755.750,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.3.963.500,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- 2) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.32.408.850,- dari anggaran RKPD 2025 sebesar Rp. 203.968.600 menjadi sebesar Rp.218.968.500,- pada APBD

Tahun 2025 menjadi Rp.236.377.450,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk mengakomodir kegiatan 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Payakumbuh pada pemberian bantuan bibit tanaman pada kelompok wanita tani (KWT).

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.24.750.000,- dari anggaran sebesar Rp.29.816.000,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.5.066.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.11.550.000,- dari anggaran sebesar Rp.17.430.000,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.5.880.000,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.7.344.750,- dari anggaran sebesar Rp.33.784.100,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.26.439.350,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025.
- 2) Sub kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp.2.893.550,- dari pagu

sebesar Rp.36.539.750,- pada RKPD dan APBD Tahun 2025 menjadi Rp.39.433.300,- pada Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk penguatan pengawasan keamanan pangan segar masyarakat.

Rincian lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III-1
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas
Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DINAS KETAHANAN PANGAN																			3.807.786.858,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.364.298.626,00	3.383.291.328,00	3.309.282.732,00	-55.015.894,00								3.807.786.858,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3.364.298.626,00	3.383.291.328,00	3.309.282.732,00	-55.015.894,00								3.807.786.858,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektoral Nilai IKM Dinas Ketahanan Pangan				86,00 indek	80,95 86,00 nilai indek	2.793.122.026,00	2.797.114.828,00	2.795.659.632,00	266.297.532,00								3.059.419.558,00		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan				85 %	85 %	84.932.200,00	84.932.200,00	65.721.800,00	-19.210.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan			95.856.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	22.390.350,00	22.390.350,00	17.393.000,00	-4.997.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			28.170.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	62.541.850,00	62.541.850,00	48.328.800,00	-14.213.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			67.685.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Terhadap Aliran Kas				90 %	90 %	2.139.106.761,00	2.143.099.563,00	2.123.995.616,00	-15.111.145,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		2.293.851.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.009.794.761,00	2.013.787.563,00	1.986.507.616,00	-23.287.145,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			2.157.155.116,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	129.312.000,00	129.312.000,00	137.488.000,00	8.176.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			136.696.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan kepegawaian				100 %	100 %	34.183.250,00	34.183.250,00	31.633.000,00	-2.550.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	44 Paket	23.011.000,00	23.011.000,00	30.250.000,00	7.239.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	11.172.250,00	11.172.250,00	1.383.000,00	-9.789.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Umum Sesuai Standar				85 %	85 %	197.417.050,00	197.417.050,00	121.935.000,00	-75.482.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		240.393.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.608.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			1.613.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	54 Paket	16.209.000,00	16.209.000,00	21.897.000,00	5.688.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			18.526.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.250.850,00	8.250.850,00	6.940.000,00	-1.310.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.862.150,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.389.500,00	8.389.500,00	8.389.500,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			8.392.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	5.265.700,00	5.265.700,00	2.495.500,00	-2.770.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.09.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	157.694.000,00	157.694.000,00	80.605.000,00	-77.089.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik				85 %	85 %	79.784.000,00	79.784.000,00	212.455.000,00	132.671.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				55 Unit	54 Unit	62.034.000,00	62.034.000,00	107.037.000,00	45.003.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	90.118.000,00	77.118.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	4.750.000,00	4.750.000,00	15.300.000,00	10.550.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Sesuai Standar				85 %	85 %	126.788.865,00	126.788.865,00	112.759.216,00	-14.029.649,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		140.821.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.765.890,00	33.765.890,00	29.377.600,00	-4.388.290,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			40.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	93.022.975,00	93.022.975,00	83.381.616,00	-9.641.359,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			100.321.192,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasana kantor dalam kondisi baik				85 %	85 %	130.909.900,00	130.909.900,00	127.160.000,00	-3.749.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Dinas Ketahanan Pangan		138.497.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.950.000,00	42.950.000,00	39.190.000,00	-3.760.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			39.190.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	78.800.000,00	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2 Unit	9.159.900,00	9.159.900,00	9.170.000,00	10.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas			9.307.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEMANDIRIAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan yang tersedia (Masyarakat+Pemda)				53,00 %	53,00 %	17.857.000,00	17.857.000,00	11.057.000,00	7.143.000,00							25.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat				17 %	17 %	17.857.000,00	17.857.000,00	11.057.000,00	-6.800.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				2 Laporan	1 Laporan	17.857.000,00	17.857.000,00	11.057.000,00	-6.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan Persentase masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE				58,00 % 62,00 %	58,00 % 62,00 %	435.749.750,00	450.749.650,00	425.747.450,00	127.617.550,00							563.367.300,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase Pengembangan Usaha Kelembagaan Distribusi Pangan 2. Persentase Informasi Harga yang Up to Date				100 % 18 %	100 % 18 %	153.700.400,00	153.700.400,00	179.177.500,00	25.477.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				30 Keluarga	30 Keluarga	47.137.000,00	47.137.000,00	46.937.000,00	-200.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi 2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				5 laporan	5 laporan	87.462.900,00	87.462.900,00	126.862.000,00	39.399.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	19.100.500,00	19.100.500,00	5.378.500,00	-13.722.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				65 %	65 %	57.325.000,00	57.325.000,00	6.229.000,00	-51.096.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		97.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1,5 Ton	0 Ton	26.346.000,00	26.346.000,00	0,00	-26.346.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			52.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				39,962 Ton	39,962 Ton	30.979.000,00	30.979.000,00	6.229.000,00	-24.750.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Diversifikasi Konsumsi Pangan 2. Persentase Masyarakat yang telah Terampil dalam Mengolah Pangan Lokal Non Beras Non Terigu				22 % 44 %	22 % 44 %	224.724.350,00	239.724.250,00	240.340.950,00	15.616.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		256.367.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.755.750,00	20.755.750,00	3.963.500,00	-16.792.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			36.124.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	203.968.600,00	218.968.500,00	236.377.450,00	32.408.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			220.242.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor PPH ketersediaan				89,20 skor	89,20 skor	47.246.000,00	47.246.000,00	10.946.000,00	12.754.000,00							60.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Instansi Terkait				50 %	50 %	29.816.000,00	29.816.000,00	5.066.000,00	-24.750.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	29.816.000,00	29.816.000,00	5.066.000,00	-24.750.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Hasil Pemanfaatan Pekarangan</i>				19 %	19 %	17.430.000,00	17.430.000,00	5.880.000,00	-11.550.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi	Masyarakat Kota Payakumbuh		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	17.430.000,00	17.430.000,00	5.880.000,00	-11.550.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan Perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi				90,00 %	90,00 %	70.323.850,00	70.323.850,00	65.872.650,00	29.676.150,00							100.000.000,00		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Masyarakat yang Memahami Zat Berbahaya bagi Pangan</i>				19 %	19 %	70.323.850,00	70.323.850,00	65.872.650,00	-4.451.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Payakumbuh		100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	33.784.100,00	33.784.100,00	26.439.350,00	-7.344.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	36.539.750,00	36.539.750,00	39.433.300,00	2.893.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berkualitas Dan Berdaya Saing			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
J U M L A H									3.364.298.626,00	3.383.291.328,00	3.309.282.732,00	-55.015.894,00							3.807.786.858,00		

IV. PENUTUP

Secara umum isi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 dan RKPD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sampai saat ini harus dapat terus ditingkatkan untuk kegiatan tahun berikutnya, sejalan dengan makin mantapnya pemahaman tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan serta seiring dengan budaya kerja profesional yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dan kualitas hasil kerja.

Menyadari bahwa kemampuan sumber daya yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan sangat terbatas terutama kuantitas personil, maka guna mewujudkan agar tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan sangat diperlukan dukungan berbagai pihak terutama stake holder terkait baik pemerintah maupun swasta, dan yang tidak kalah penting adalah adanya peran serta aktif dari masyarakat.

Payakumbuh, 8 Agustus 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EWIDEL ARDA, S.IP, MM
IP 19700124 199003 1 001